

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penulis Tahun	Universitas	Metode Penelitian	Kesimpulan	Saran	Perbedaan dengan penelitian ini
1	PEMBERITAA N MEDIA DARING TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PEMBELAJARAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 OLEH KEMENDIKBUD: ANALISIS FRAMING ROBERT N. ENTMAN Freisty Oktarida 2021	Institut Agama Islam Negeri Bengkulu	Analisis Framing Robert N. Entman	Media online Detik.com lebih pro terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh kemendikbud, Sementara itu, Kompas.com sebagai media daring cenderung memiliki sikap netral terhadap kebijakan yang diumumkan. Hal ini disebabkan tidak hanya menyajikan berita yang berisi informasi, tetapi juga menggambarkan fenomena yang sedang terjadi dalam masyarakat.	Mengumpulkan data dari media daring paling lambat enam bulan setelah berita dipublikasikan penting agar sesuai dengan topik penelitian. Menjadi lebih berwaspada saat menerima informasi dari platform daring karena tidak semua konten yang disajikan dapat dianggap sebagai berita yang akurat. Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan lebih dari dua sumber media, menerapkan teori analisis	Perbedaan dengan penelitian ini hanya pada pemilihan satu media saja yaitu media Kompas.com dan pemilihan isu yang diangkat dalam melakukan penelitian ini namun dalam menganalisis suatu isu sama menggunakan analisis framing model Entman.

				<p>pembingkai- an pemberita- an oleh situs berita seperti Tempo.co dan Kompas.com memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi tentang kesehatan dan risiko. Informasi ini seharusnya dianggap sebagai sumber informasi serta sebagai alat mitigasi risiko yang dapat mem- bantu persiapan masyarakat men- ghadapi ancaman dan memberikan panduan selama masa krisis. Per- bedaan dalam gaya penyajian berita terkait himbauan pemer- intah mengenai Covid-19 dapat mempengaruhi cara berita dipre- sentasikan, ter- gantung pada prioritas dan tu- juan masing-ma- sing situs berita daring. Selain itu, pola pemb- ingkai-an yang digunakan juga memengaruhi cara isu disusun dalam berita.</p>	<p>framing dari pakar lain, serta memper- hatikan per- bedaan tema yang signifikan antara satu media dengan media lain- nya. Hasil pen- elitian menun- jukkan bahwa Kompas.com dan Tempo.co memiliki pemb- ingkai-an berita yang berbeda terkait himbau- an Pemerintah Indonesia men- genai Covid-19, menunjukkan peran framing media. Masya- rakat diharap- kan lebih kritis dalam mengon- sumsi berita online. Peneli- tan selanjutnya akan mengkaji lebih dalam produksi teks menggunakan metode Critical Discourse Analysis dan bisa memperlu- as rentang wa- ktu analisis dan memusatkan perhatian pada liputan komu- nikasi risiko oleh media</p>	<p>Perbedaan dari peneli- tan ini yang dimana peneli- tan tersebut mengguna- kan analisis framing model Pan & Kosicki sedangkan penelitian yang sedang dilakukan men- gunakan Etno- man, dan pem- ilihan isu yang berbeda ter- kait kebijakan pemerintah. Dalam peneli- tan ini fokus dari pemilihan berbeda dengan penelitian tersebut.</p>
--	--	--	--	--	---	--

					daring nasional dengan menggunakan metode analisis isi yang bersifat kualitatif.	
3	WACANA PRO DAN KONTRA KEBIJAKAN PUBLIK DI MEDIA ONLINE (Framing Berita Kebijakan Pemerintah tentang Subsidi Kendaraan Listrik di <i>Kompas.com</i>) Nabila Indira Alhalabi 2023	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Analisis framing model Robert N. Entman	Kesimpulan dari kalimat tersebut adalah bahwa Kompas.com memberikan penekanan pada ketidaktepatan sasaran kebijakan tertentu dan mengusulkan bahwa kebijakan tersebut harus lebih berorientasi pada kepentingan publik agar manfaatnya dapat mencakup berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, Kompas.com juga menyoroti potensi masalah yang mungkin muncul akibat kebijakan tersebut. Media ini memberikan kritik terhadap pemerintah, Mengajukan dorongan agar pemerintah memberikan subsidi kepada sektor yang membutuhkan lebih banyak dukungan, dan berharap pemerintah dapat meningkatkan pelaksanaan kebijakan tersebut guna memberikan manfaat yang lebih merata kepada masyarakat.	Media dalam dunia jurnalistik lebih mengedepankan sikap <i>cover book side</i> atau melakukan pemberitaan dengan berimbang dalam menyampaikan informasi serta menulis berdasarkan fakta dan nilai – nilai kebenaran bukan berdasarkan kebenaran yang sudah dikonstruksikan media massa.	Perbedaan dengan penelitian ini yang dimana berbeda dalam fokus penelitiannya. Dalam penelitian tersebut berfokus kepada kebijakan pemerintah tentang subsidi untuk kendaraan listrik yang diberitakan oleh media Kompas.com dengan begitu fokus dari penelitian berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan dan pemilihan media yang berbeda.

Dalam penelitian ini, penelitian sebelumnya digunakan sebagai referensi untuk mendukung dan merujuk informasi. Pada penelitian pertama Pada penelitian pertama yang ditulis oleh Freisty Oktarida pada tahun 2021 yang berjudul "Penggunaan analisis framing Robert N. Entman digunakan untuk mengevaluasi cara media daring melaporkan kebijakan pembelajaran selama pandemi Covid-19 yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Fokus analisis ini terletak pada perbandingan framing berita di portal Detik.com dan Kompas.com terkait kebijakan pembelajaran selama masa pandemi Covid-19 oleh Kemendikbud." Rujukan pada penelitian awal ini mengadopsi pendekatan metodologi (pendekatan kualitatif deskriptif), Kemudian, dilakukan analisis menggunakan metode analisis wacana. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah pencarian data secara online. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam konteks media daring, Detik.com lebih cenderung mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sementara Kompas.com cenderung bersikap netral terhadap kebijakan tersebut. Perbedaan ini disebabkan oleh pendekatan Kompas.com yang tidak hanya memaparkan informasi berita, tetapi juga mencakup fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian terdahulu yang kedua yaitu ditulis oleh Sri Wijayanti dan Isti Puwi Tyas Utami pada tahun 2022 yang berjudul "Pembingkai pemberitaan himbauan pemerintah Indonesia terkait covid-19 di situs berita online". Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis framing Pan dan Kosicki sehingga dapat didapatkan analisis komprehensif mengenai struktur pemberitaan. Hasil penelitian mencatat perbedaan dalam cara kedua situs berita mengemas himbauan pemerintah. Kompas.com menitikberatkan pada pemberitaan yang menekankan fungsi edukatif untuk mendukung kinerja pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pembingkai pemberitaan mengenai himbauan pemerintah terkait Covid-19 oleh situs berita online. Kajian ini menjadi penting dan menarik untuk diselidiki karena secara ideal, diinginkan agar portal berita daring memiliki peranan yang substansial dalam mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan pemerintah dalam konteks komunikasi kesehatan melalui peliputannya. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa cara berita diformulasikan oleh situs berita seperti Tempo.co dan Kompas.com memiliki dampak signifikan dalam menyampaikan informasi terkait kesehatan dan risiko kepada masyarakat. Informasi ini harus dijadikan sebagai sumber informasi dan alat mitigasi risiko yang membantu persiapan masyarakat dalam menghadapi risiko dan memberikan panduan selama krisis. Perbedaan dalam cara penyajian berita mengenai himbauan pemerintah terkait Covid-19 dapat memengaruhi tata cara penyajian berita, bergantung pada prioritas

dan tujuan yang dimiliki oleh setiap situs berita online. Selain itu, pola framing yang diterapkan juga berdampak pada cara isu tersebut disusun dalam berita.

Penelitian terdahulu ketiga, yang ditulis oleh Nabila Indira Alhalabi yang berjudul “Wacana pro dan kontra kebijakan publik di media daring (framing berita kebijakan pemerintah tentang subsidi kendaraan listrik di Kompas.com)”. Dalam studi ini, diterapkan metode analisis deskriptif kualitatif mengikuti pendekatan Robert N. Entman dengan maksud menginvestigasi cara Kompas.com merancang liputannya yang mencerminkan dukungan dan kritik terhadap kebijakan subsidi kendaraan listrik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kompas.com menekankan pentingnya kebijakan yang lebih akurat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Mereka juga mengingatkan tentang potensi masalah akibat kebijakan tersebut dan mendorong pemerintah untuk memberikan subsidi kepada sektor yang membutuhkan, serta memperbaiki pelaksanaan kebijakan untuk mendapatkan manfaat yang lebih luas.

Dalam situasi ini, fokus penelitian berpusat pada analisis kerangka berita tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan sekolah dan kampus sebagai tempat kampanye. Penelitian ini membandingkan cara media Detik dan Tribunnews menghadirkan berita tersebut di platform online mereka selama periode Agustus hingga September 2023. Kebaruan penelitian dari penelitian sebelumnya yaitu pada isu yang dipilih serta pemilihan portal berita online. Dalam pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya di atas penelitian ini mengangkat topik terkait dengan Pembingkai Berita Putusan Mahkamah Konstitusi Memperbolehkan Kampanye Sekolah Dan Kampus Menjadi Tempat Kampanye Antara Detik dan Tribunnews Periode Agustus – September 2023 dengan memanfaatkan dua platform berita daring tingkat nasional, yaitu Detik dan Tribunnews, peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi pembingkai berita pada kedua media tersebut. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan framing Robert N. Entman untuk memahami cara kedua portal media online tersebut menyajikan dan mengonstruksi informasi.

2.2 Teori dan Konsep

2.2.1 Peran Pers

Pers yang berfungsi sebagai sarana komunikasi publik, memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan jurnalistik yang melibatkan proses pencarian, perolehan, kepemilikan, penyimpanan, pengolahan, dan penyaluran informasi dalam berbagai bentuk, termasuk teks, audio, gambar, audiovisual, data, grafik, dan format lainnya. Tindakan ini dilakukan melalui berbagai platform, seperti surat kabar, media elektronik, dan saluran komunikasi lainnya. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, kemerdekaan pers diakui sebagai ungkapan dari kedaulatan rakyat dan dianggap sebagai elemen yang sangat penting dalam membentuk kehidupan masyarakat, menjalin kehidupan berbangsa, dan menciptakan sistem negara yang demokratis. Untuk itu, kebebasan untuk mengungkapkan gagasan dan pandangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, perlu dijamin dan ditegakkan (Dewanpers, 2023).

Terdapat beberapa peran pers untuk menjalankan suatu tugas atau kewenangan sebagai lembaga peran pers (Harruma dan Nibras, 2022).

1. Menyebarkan informasi: Media massa memegang peran signifikan dalam menyampaikan informasi kepada publik, Sesuai dengan aturan yang tertera dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. Perangkat pengawasan sosial: Media massa berperan sebagai perangkat pengawasan sosial dengan memonitor dan memberikan kritik terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia, penyalahgunaan kekuasaan, tindak kriminal, serta segala hal yang dapat membahayakan stabilitas perekonomian.
3. Penyambung lidah masyarakat: Fungsi media massa sebagai perantara memungkinkan masyarakat untuk mengkomunikasikan aspirasi, kritik, dan saran kepada pemerintah.
4. Memberikan pengetahuan untuk peningkatan wawasan masyarakat adalah peran media massa dalam ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. Mempengaruhi pandangan masyarakat: Peran krusial media massa terletak pada kemampuannya memengaruhi perspektif masyarakat melalui penyajian informasi yang akurat, tepat, dan benar.

Fungsi-fungsi media massa dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, diantaranya :

1. Memberikan akses informasi kepada seluruh masyarakat.
2. Menghargai prinsip-prinsip demokrasi untuk mendukung supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, sambil dengan cermat menjaga keberagaman.
3. Menciptakan pandangan masyarakat dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat, dan benar.
4. Memantau, mengevaluasi, memperbaiki, dan memberikan rekomendasi terhadap berbagai aspek yang terkait dengan kepentingan masyarakat.
5. Bertarung demi mencapai keadilan dan kebenaran.

Dengan konteks ini, peran media memiliki fungsi, dan salah satu fungsi utama adalah sebagai penyedia informasi. Ini terjadi karena masyarakat memerlukan informasi mengenai berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk hal-hal seperti ekonomi, politik, hobi, dan berbagai bidang lainnya yang memberikan manfaat. Informasi yang diberikan oleh media telah melewati proses pemilihan dari berita yang dihimpun oleh wartawan di lapangan dari berbagai sumber. Tidak hanya itu, media juga berperan konstruktif dalam mendukung kemajuan masyarakat serta bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi tentang perkembangan dan prestasi pembangunan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, media beroperasi sebagai sarana komunikasi antara media dan masyarakat secara umum (Sukma, 2019).

2.2.2 Media Daring

Penyebaran informasi kepada publik dapat dilakukan dengan cepat dan relatif mudah, sistem komunikasi dikenal dengan sebutan media daring. Melalui perangkat digital, masyarakat dapat mengakses dengan mudah mengenai berita dan informasi yang tersedia secara daring. Media daring merupakan bentuk revolusi dari media konvensional yang telah beradaptasi dengan zaman dan biasanya

menyajikan konten – konten jurnalistik. Terdapat beberapa jenis media daring diantaranya media nasional dan daerah. Media online nasional umumnya memiliki cakupan berita yang lebih luas dikarenakan ditujukan kepada audiens secara nasional, sementara media daring daerah bertujuan untuk menyediakan informasi dan berita yang berfokus pada suatu wilayah tertentu (Hidayat, 2022)

Bersamaan dengan perkembangan waktu, hubungan antara media dan teknologi menjadi semakin erat. Perkembangan teknologi yang cepat memiliki dampak besar pada evolusi media dalam masyarakat. Misalnya, perkembangan teknologi internet pada dekade 1960-an telah bertransformasi menjadi landasan untuk apa yang saat ini kita kenal sebagai media digital. Media digital merupakan produk dari jurnalisme daring atau jurnalisme cyber, yang dapat diartikan sebagai penyampaian informasi atau kejadian yang dibuat dan disebarluaskan melalui internet.

Media online adalah bentuk media yang menggunakan teknologi internet untuk menyebarkan informasi dan konten pengguna. Jenis media ini tergolong dalam kategori multimedia dan telekomunikasi dalam lingkup media daring, melibatkan portal, situs web (baik web maupun media sosial seperti Facebook dan Twitter), radio online, TV online, dan email. Salah satu bentuk desain media online yang sering digunakan dalam jurnalisme modern adalah situs berita. Sebagai platform informasi, situs berita berfungsi sebagai gerbang akses untuk berbagai fitur teknologi online dan konten berita. Isinya melibatkan beragam layanan interaktif yang secara langsung terhubung dengan informasi, seperti kolom komentar, penelusuran artikel, platform forum diskusi, dan lain sebagainya. Selain itu, situs berita juga bisa menyediakan elemen-elemen yang tidak terkait dengan berita, seperti permainan, obrolan, kuis, dan lain sebagainya (Lindgren dalam Darminto, 2017).

Penguraian di atas menggambarkan rinci definisi media digital, yang dijelaskan sebagai suatu bentuk produk jurnalistik yang menyampaikan informasi melalui perangkat komputer dan internet. Jenis media ini dianggap sebagai inovasi yang menyederhanakan istilah untuk media yang beroperasi di luar kerangka media massa tradisional.

a. Ciri - Ciri Media Daring

Media digital sering disebut sebagai bentuk media modern, karena menganut prinsip-prinsip media baru yang berbeda dari media massa konvensional seperti surat kabar, radio, dan televisi. Perbedaan ini mencakup aspek format, konten, mekanisme, serta interaksi antara penyedia media online dan pengguna.

Menurut Romli (2018) dalam bukunya, media online memiliki ciri khasnya sendiri yang sekaligus menjadi keunggulan dibandingkan dengan media konvensional, baik yang bersifat cetak maupun elektronik. Keunggulan ini terkait dengan karakteristik jurnalisme online, yang diantaranya :

1. Multimedia dapat menampilkan berita atau informasi secara serentak dalam berbagai format, termasuk teks, audio, video, grafis, dan gambar.
2. Keterkinian, memuat informasi yang terkini karena proses penyajian yang mudah dan cepat.
3. Cepat, dapat diakses oleh siapa pun saat diunggah secara langsung.
4. Pembaruan memungkinkan informasi untuk di-update dengan cepat, termasuk dalam aspek konten maupun redaksional, seperti perbaikan kesalahan ketik atau ejaan.
5. Dengan kapasitas yang besar, halaman web mampu menyimpan teks dalam jumlah yang sangat besar.
6. Flesibilitas, proses pengeditan teks mampu dilaksanakan tanpa batasan waktu dan lokasi, sesuai berdasarkan agenda penerbitan fleksibel.
7. Merata, dapat mencakup seluruh dunia yang mempunyai akses ke internet.
8. Berinteraksi, melalui fitur-fitur seperti ruang tanggapan dan forum diskusi .
9. Tertangkap, catatan materi terdapat dalam arsip dan bisa diakses dari link, tulisan , atau pencarian online.

2.2.3 Pemberitaan

Berita merupakan suatu laporan atau narasi singkat tentang suatu kejadian atau informasi yang dianggap signifikan atau menarik untuk disampaikan kepada audiens. Berita merupakan apa yang membuat seseorang berbicara dan berita

adalah pengungkapan sesuatu yang belum diketahui oleh orang lain. Berita biasanya disajikan dalam bentuk format tertulis, lisan atau visual dan memiliki karakteristik tertentu untuk membedakannya dari bentuk komunikasi lainnya.

Menurut Kusumaningrat (2016) berita memiliki beberapa unsur agar bisa dijadikan sebuah berita yang baik dan layak untuk dipublikasikan, diantaranya:

a. Akurat

Dalam pelaksanaan pemberitaan, diperlukan tingkat kewaspadaan yang sangat tinggi karena pemberitaan memiliki potensi untuk berdampak secara luas. Oleh karena itu, setiap tulisan harus tepat dan seperti apa yang terjadi di tempat kejadian perkara

b. Lengkap, adil ataupun berimbang

Seorang jurnalis diharapkan untuk menghasilkan berita yang didasarkan pada fakta yang sebenarnya terjadi di lokasi peristiwa. Berita yang disusun sebaiknya tidak disajikan secara kurang atau berlebihan. Informasi yang ingin disampaikan harus jujur dan tidak boleh dimanipulasi, serta disampaikan secara obyektif tanpa bias yang signifikan.

c. Obyektif

Berita disusun sesuai dengan realitas yang ada, tanpa distorsi atau pengaruh dari asumsi atau prasangka.

d. Ringkas dan Jelas

Cara penyampaian berita harus memungkinkan pembaca untuk memahaminya dengan cepat. Oleh karena itu, penulisan berita harus singkat dan mudah dipahami. Kualitas pemberitaan dapat dipengaruhi oleh efektivitas penulisan.

e. Hangat

Ketertarikan untuk menyajikan berita kepada masyarakat umum dapat dipengaruhi oleh sejauh mana berita tersebut aktual dan relevan. Kejadian masa lalu yang masih memiliki ketertarikan juga dapat menarik minat dari publik.

Dari beberapa unsur yang telah disebutkan diatas, dalam sebuah pemberitaan yang telah ditulis oleh jurnalis harus dapat mengacu kepada beberapa unsur yang paling mendasar dalam pembuatan sebuah isi berita yang lengkap.

Dalam Bangun et.al (2019) terdapat beberapa unsur penting untuk pelengkap sebuah berita biasanya dikenal seperti 5W dan 1H, yang diantaranya:

1. *What*: Apa yang sedang terjadi?
2. *Where*: Dimanakah peristiwa itu terjadi?
3. *When*: Kapankah peristiwa itu terjadi?
4. *Who*: Siapa sajakah yang ikut terlibat dalam peristiwa itu?
5. *Why*: Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi?
6. *How*: Bagaimanakah peristiwa dapat terjadi?

2.2.4 Nilai Berita

Nilai berita adalah suatu aspek atau kriteria yang digunakan oleh jurnalis dan media massa untuk menilai apakah suatu peristiwa atau informasi yang diperoleh pantas untuk disiarkan. Nilai berita dapat membantu dalam memilih, mengedit dan menyajikan berita kepada masyarakat. Nilai berita mempunyai variasi yang beragam tergantung dari pada kebijakan editorial, jenis media dan audiens yang dituju. Prosedur penilaian berita dapat membatasi seleksi peristiwa yang diangkat menjadi informasi. Semakin signifikan, jarang terjadi, dan semakin relevan dengan pemirsa, maka suatu peristiwa dapat diputuskan untuk dijadikan informasi. Seluruh langkah ini berkaitan dengan tahapan produksi berita, di mana prinsip-prinsip dalam rutinitas kerja media massa menjadi bagian esensial dari pemahaman wartawan (Salsabila, 2019).

Namun terdapat beberapa aspek kriteria umum dalam sebuah nilai berita yang dapat mendasari dalam menilai sebuah berita (Fitriyah, 2016).

1. *Kepentingan (Significant)*
Suatu peristiwa dianggap bernilai berita jika memiliki dampak yang signifikan atau penting bagi masyarakat atau kelompok tertentu. Peristiwa besar seperti bencana alam, konflik internasional, perubahan politik, atau isu-isu sosial yang kontroversial cenderung memiliki nilai berita yang tinggi.

2. Aktual (*Timeliness*)

Berita harus segar dan relevan dengan waktu saat ini. Informasi yang sudah usang mungkin kehilangan nilai berita. Oleh karena itu, jurnalis berusaha untuk memberitakan peristiwa sesegera mungkin setelah terjadi.

3. Keluarbiasaan (*Unusualness*)

Berita memiliki keistimewaan dan dapat dinilai berdasarkan lima faktor, yakni tempat kejadian, waktu kejadian, jumlah korban, Kejutan peristiwa dan dampak yang timbul dari peristiwa tersebut menjadi fokus. Ketepatan akurasi harus menjadi prioritas dalam menyajikan berita dengan keakuratan dan kebenaran. Jurnalis harus memastikan bahwa informasi yang disajikan berdasarkan fakta yang terverifikasi dengan baik.

4. Kedekatan (*Proximity*)

Peristiwa yang terjadi di dekat lokasi pemberitaan biasanya lebih memiliki nilai berita daripada peristiwa yang terjadi jauh dari lokasi tersebut.

5. Konflik (*Conflict*)

Konflik, baik itu konflik politik, sosial, atau pribadi, seringkali menjadi berita karena menarik perhatian dan ketertarikan manusia terhadap konflik.

6. Keistimewaan (*Prominence*)

Orang-orang yang memiliki status atau pengaruh yang tinggi, seperti tokoh-tokoh publik atau selebriti, seringkali menjadi subjek berita karena keistimewaannya.

7. Ketertarikan manusiawi (*human interest*)

Segala sesuatu yang menarik perhatian manusia, memupuk keinginan untuk tahu, dan membangkitkan emosi sehingga mempengaruhi perasaan audiens, dapat dianggap sebagai berita.

Dengan demikian, setiap media perlu memiliki kebijakan editorial yang unik dalam menilai suatu berita, dan evaluasi terhadap faktor-faktor tersebut mungkin bergantung pada jenis media dan audiens yang menjadi targetnya. Namun, dari nilai-nilai berita pada umumnya digunakan sebagai panduan dalam menentukan apa yang akan diberitakan tentang sebuah peristiwa yang sedang terjadi atau dalam menyampaikan suatu informasi tertentu kepada khalayak.

2.2.5 Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah merupakan sebuah perangkat tindakan, keputusan dan langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan dalam pengelolaan suatu negara atau wilayah. Kebijakan pemerintah mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang diantaranya seperti ekonomi, sosial, politik, lingkungan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Dengan mempunyai tujuan yang bervariasi didalamnya termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempromosikan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan keamanan nasional, menjaga ketertiban sosial dan melindungi lingkungan (BPSDM Provinsi Sulsel, 2023).

Kebijakan pemerintah biasanya disusun melalui berbagai prosesnya seperti perencanaan, pengambilan putusan dan pelaksanaan yang melibatkan dari berbagai lembaga pemerintah, para ahli dan pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan pemerintah dapat berupa undang – undang, regulasi, program – program sosial, anggaran ataupun langkah – langkah lainnya ya ditetapkan atau dijalankan oleh lembaga pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung secara adil, transparan, dan demokratis, sengan demikian, Penduduk negara memiliki hak untuk secara bebas dan sah memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan. Pemilihan umum yang diadakan secara teratur juga merupakan cara yang sangat mendasar untuk menyampaikan hak-hak asasi warga negara melalui ekspresi pendapat mereka. Dengan demikian, pemerintahan negara yang terbentuk melalui pemilihan berasal dari kehendak rakyat dan dijalankan sepenuhnya untuk kesejahteraan mereka. Menurut Novembri Yusuf (2017) beberapa indikator yang ada dalam kebijakan terkait pemilihan umum, yaitu :

1. Program desa peduli pemilu.
2. Sosialisasi melalui media cetak dan media sosial.
3. Regulasi peraturan bersama yang meningkatkan efektivitas penidakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepolisian Republi Indonesia dan Jaksa Agung.
4. Regulasi pilkada yang lebih adiktif dan ramah HAM.
5. Artisipasi publik yang memadai dalam pilkada.

6. Edukasi masyarakat terhadap penggunaan teknologi informasi yang aman dan memadai.
7. Jaminan perlindungan dan perlakuan khusus kepada kelompok rentan seperti, orang dengan disabilitas, narapidana dan tahanan, serta pasien di rumah sakit.
8. Proses perekaman ataupun penerbitan e-KTP yang masih aktif dan maksimal.

2.2.6 Konstruksi Realitas Media dan Kepemilikan

Konstruksi realitas pada media merupakan pandangan bahwa bagaimana media tidak hanya menjadi sebagai saluran informasi sebagai individu yang memiliki kebebasan, namun juga sebagai pihak yang membentuk realitas secara menyeluruh melalui sudut pandang, ketidakterobjektifan, dan preferensi dari suatu media. Dalam media ini, pembentukan realitas dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal seperti ideologi, sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya.

Penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasi konstruksi realitas pada media baik dari televisi lokal ataupun media online. Dalam penelitian ini peneliti mengkonstruksi realitas dalam melaporkan berita melalui platform media Detik dan Tribunnews mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tentang tempat pendidikan menjadi tempat kampanye pemilu pada tahun 2023 ini pada periode dalam media Agustus hingga September 2023. Dalam analisis *framing* terhubung dengan konstruksi realitas media, praktik framing menghasilkan realitas yang dibentuk secara khusus oleh media. Dengan demikian, media memegang peran signifikan karena memiliki kemampuan untuk membentuk realitas media melalui penyajian citra framing. Scheufele dalam (Romadhan dan Izzmy, 2022).

Kepemilikan media memiliki dampak signifikan terhadap konstruksi realitas media. Media yang dimiliki oleh kelompok atau individu tertentu dapat memengaruhi berita yang mereka publikasikan, serta bagaimana berita tersebut diframing atau narasinya. Oleh karena itu, penting untuk memahami kepemilikan media dalam konteks konstruksi realitas media untuk menilai sejauh mana media memengaruhi pandangan dan pemahaman kita tentang dunia. Dalam konteks ini,

isu seperti pluralisme media dan independensi media sangat relevan dalam menjaga keragaman informasi dan kebebasan pers. Sebuah peristiwa politik kemungkinan besar akan mendapatkan respons yang beragam dari berbagai media, termasuk dalam penempatan berita, volume pemberitaan, dan teknik serta kecenderungan pemberitaan. Oleh karena itu, konten media mengenai peristiwa tersebut dapat direspons secara berbeda oleh audiens dari media yang berbeda. Konstruksi realitas media memiliki beberapa kriteria di dalamnya (Kamaruddin, 2016).

1. Pemilihan Berita

Putusan tentang peristiwa apa yang akan diangkat menjadi berita merupakan kriteria penting dalam konstruksi realitas media. Biasanya, peristiwa yang memiliki nilai berita tinggi atau kontroversial akan lebih mungkin dipilih.

2. *Framing* (Pengemasan Berita)

Cara berita disajikan, termasuk pemilihan bahasa, gambar, dan fokus cerita,

- memainkan peran besar dalam bagaimana informasi diberikan kepada audiens.

3. Narasi

Cara berita disusun menjadi cerita atau narasi dapat memengaruhi bagaimana audiens memahami peristiwa tersebut. Naratif yang kuat dapat membentuk persepsi.

4. Editorial dan Pandangan

Redaksi media, termasuk opini editorial, juga memengaruhi cara media mengartikulasikan sudut pandang tertentu tentang isu atau peristiwa.

5. Penggunaan Multimedia

Penggunaan gambar, video, grafik, dan elemen multimedia lainnya dalam berita juga dapat memengaruhi cara informasi disampaikan dan dipahami.

Konsentrasi kepemilikan media pada kelompok atau individu tertentu dapat membatasi variasi perspektif yang disajikan oleh media, memengaruhi pembentukan realitas oleh masyarakat. Namun, di era digital, akses masyarakat ke berbagai sumber informasi telah meningkat, memungkinkan mereka mencari sudut pandang yang beragam. Oleh karena itu, sementara kepemilikan media tetap berperan dalam membentuk konstruksi realitas, masyarakat juga memiliki kemampuan untuk membentuk pandangan pribadi tentang dunia.

2.2.7 Kampanye di Pendidikan

Kampanye dapat dimaknai sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu entitas untuk mempromosikan atau memperkenalkan suatu produk, jasa, atau gagasan kepada khalayak. Kampanye juga bisa dimaknai sebagai usaha untuk memengaruhi pandangan atau tindakan masyarakat terkait suatu isu atau topik tertentu. Kampanye dapat dilakukan oleh sejumlah entitas, seperti perusahaan, organisasi, partai politik, atau individu, dan dapat memanfaatkan berbagai media, termasuk iklan, media sosial, atau kegiatan publik (Fatimah, 2018).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai aksi kolektif untuk menentang sesuatu, melakukan protes, dan sejenisnya. Di sisi lain, kampanye juga dapat dijelaskan sebagai aktivitas dilakukan oleh partai politik atau calon untuk berkompetisi di legislatif atau dalam pemilihan lainnya, dengan tujuan mendapatkan dukungan dari massa pemilih. Dalam kamus tersebut, politik dijelaskan sebagai pengetahuan tentang sistem negara, termasuk informasi mengenai tata pemerintahan dan prinsip dasar pemerintahan. Sebagai hasilnya, kampanye dianggap sebagai unsur penting dalam komunikasi politik, dan setiap kejadian politik tidak terlepas dari peran kampanye politik.

Definisi kegiatan pemilihan sebagai sebuah usaha terorganisasi yang dikerjakan oleh sekelompok orang dengan maksud untuk membujuk merayu atau mendesak pihak lain untuk menerima, mengubah, atau menolak ide, sikap, tindakan praktis, dan perilaku tertentu (Kotler dan Roberto dalam Hakim 2022). Dengan demikian, kampanye dapat dijelaskan sebagai suatu langkah untuk mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk pesan politik yang disampaikan kepada audiens melalui berbagai saluran dan media komunikasi, dengan maksud untuk memengaruhi dan membentuk opini publik. Tambahan pula, kampanye politik juga dapat diterangkan sebagai upaya terstruktur yang bertujuan mempengaruhi keputusan para pemilih.

Kampanye bertujuan dalam rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh kandidat atau partai politik dengan maksud memperkenalkan diri dan memengaruhi pandangan masyarakat dalam suatu pemilihan umum. Dalam Halim dan

Widayatmoko (2014) kampanye politik melibatkan berbagai strategi dan teknik, seperti iklan politik, debat publik, kampanye pintu ke pintu, dan penggunaan media sosial. Tujuan dari kampanye politik adalah untuk memenangkan pemilihan umum dan memperoleh dukungan dari pemilih, juga membahas tentang etika dan hukum dalam kampanye politik. Melaksanakan upaya promosi di lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi berisiko menghambat proses pembelajaran dan dapat mengancam netralitas institusi pendidikan. Oleh karena itu, pada putusan Mahkamah Konstitusi memperbolehkan berkampanye di sekolah dan kampus perlu ada aturan yang ketat diterapkan untuk menghindari gangguan kegiatan politik praktis yang dapat menghambat proses pembelajaran. Beberapa sumber juga memberikan informasi tentang rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum yang membatasi kampanye di tempat pendidikan hanya untuk perguruan tinggi dan pentingnya pihak yang mengelola lembaga pendidikan diharapkan membuat keputusan yang cermat dan mempertimbangkan elemen-elemen penting seperti netralitas, keamanan, dan pendidikan politik (MKRI, 2023).

2.2.8 Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi, sebagai elemen integral dari konstitusi sesuai dengan UUD 1945, diberi tugas untuk melindungi, menjaga, dan mengawasi konstitusi di Indonesia. Tugas pokoknya adalah sebagai alat untuk mencapai konstitusionalisme yang sempurna. Oleh karena itu, konstitusi perlu mengandung ketentuan-ketentuan yang memungkinkan pengendalian dan pembatasan terhadap kekuasaan politik serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Demi memenuhi dan melindungi hak-hak konstitusional warga Indonesia, Mahkamah Konstitusi melaksanakan fungsinya dengan mengawasi proses pembuatan Undang-Undang oleh DPR dan Pemerintah, memastikan kesesuaian dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini dilakukan dengan maksud untuk menghindari kepentingan pragmatis (MKRI, 2015).

Secara umum, keputusan Mahkamah Konstitusi, terutama dalam konteks pengujian undang-undang, bersifat deklaratif konstitutif. Hal ini menyiratkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi dapat menyebabkan terbentuk atau

dibatalkannya situasi hukum baru, atau pembentukan hukum baru hanya melalui kapasitas legislatif negatif. Dalam perspektif Hans Kelsen, keputusan deklaratif tidak memerlukan keterlibatan lembaga eksekutif dalam pelaksanaan keputusan hakim Mahkamah Konstitusi. Efendi (2023) Telah diuraikan variasi jenis keputusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut mengidentifikasi tiga bentuk amar keputusan yang mungkin diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni amar keputusan yang menyatakan tidak dapat diterimanya permohonan, amar keputusan yang menyatakan diterimanya permohonan, dan amar keputusan yang menyatakan penolakan atas permohonan:

a. Putusan tidaklah diterima (*non-receivable*)

Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan dapat ditolak jika pemohon melanggar aturan hukum atau tidak memenuhi persyaratan, sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Dalam keputusan tertulisnya, Mahkamah Konstitusi akan menyatakan penolakan permohonan apabila persyaratan pemohon dan/atau permohonan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 50 dan Pasal 51, tidak terpenuhi. Dengan penghapusan Pasal 50, pemohon diwajibkan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 51, yang mensyaratkan pemohon memiliki kedudukan hukum yang jelas apabila merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh undang-undang tertentu.

b. Putusan dikesampingkan (*ontzegd*)

Putusan yang menegaskan penolakan permohonan terjadi apabila permohonan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sesuai dengan Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, hal ini terjadi ketika undang-undang yang diuji dianggap sesuai dengan Konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi akan menyatakan penolakan terhadap permohonan, dan undang-undang yang diuji tetap berlaku di masyarakat karena tidak dianggap melanggar Konstitusi.

c. Putusan diterima

Putusan yang menyatakan bahwa permohonan diterima terjadi apabila pemohon memiliki dasar hukum yang kokoh dalam menguraikan

permohonannya. Dewan hukum melihat bahwa pengajuan tersebut memiliki alasan yang sah, dan keputusan Mahkamah menyatakan bahwa permohonan dikabulkan. Dengan kata lain, jika Mahkamah mengabulkan permohonan, itu berarti UU yang diuji tidaklah sah menurut lembaga. Hal ini telah diatur Dari segi normatif, sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dijelaskan bahwa jika isi atau proses pembentukan undang-undang tidak sesuai dengan Konstitusi, maka undang-undang tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip konstitusional.

Dalam penelitian ini, fokus ditetapkan pada pemilihan isu dan peristiwa tertentu, yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi objek utama dalam konteks memperbolehkan kampanye di sekolah dan kampus, sesuai dengan putusan yang diambil pada tanggal 15 Agustus 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi cara pemberitaan isu tersebut ditampilkan keduanya, yakni Detik dan Tribunnews, khususnya pada periode Agustus hingga September 2023.

2.2.9 Framing

Menurut Sobur (2018) Analisis framing adalah suatu pendekatan untuk mengamati bagaimana media menyajikan informasi dalam konteks yang spesifik, di mana suatu isu diberikan penekanan lebih besar dibandingkan isu lainnya. Teknik ini melibatkan pemahaman terhadap proses bagaimana suatu peristiwa atau isu dijelaskan, diinterpretasikan, dan diberikan makna oleh media. Framing merupakan suatu analisis yang termasuk dalam penelitian konstruktivisme, yang Menyatakan bahwa realitas dalam kehidupan sosial bukanlah sesuatu yang secara alamiah terjadi, tetapi merupakan produk dari suatu proses pembangunan. Pendekatan konstruktivisme menitikberatkan analisis pada bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dibangun dan melalui metode seperti apa konstruksi tersebut dilakukan.

Framing merupakan suatu metode dalam penelitian media yang digunakan untuk mengevaluasi bagaimana media membentuk suatu peristiwa atau isu dengan cara tertentu, dengan tujuan memengaruhi persepsi dan pemahaman penonton.

Framing bisa disimpulkan bahwa digunakan untuk memahami bagaimana wartawan memandang dan mendekati suatu peristiwa atau topik suatu berita. Saat mereka memilih isu untuk diterbitkan dan menulis berita, perspektif ini secara keseluruhan mempengaruhi pemilihan fakta yang akan disertakan dalam berita tentang bagaimana yang akan diberi penekanan dan apa yang akan dihilangkan dan pesan apa yang akan disampaikan oleh pembaca nantinya. Dikarenakan berita tersebut akan dapat cenderung mengarah kepada upaya untuk manipulatif dan bermaksud menguasai citra subjek sebagai sesuatu yang netral, biasa atau tidak dapat dihindari. Pada konteks ini, analisis framing difokuskan pada bagaimana media menghadapi dan memberikan makna terhadap realitas, serta tanda-tanda apa yang mereka gunakan untuk menginterpretasikan realitas tersebut (Sobur, 2018).

Menurut Sobur dalam Ningrum (2023) beberapa model analisis framing telah diusulkan oleh para ahli, dan salah satu yang sering digunakan dalam pembentukan kerangka berita adalah analisis framing yang dikembangkan oleh Robert N. Entman. Dalam perspektif framing-nya, Entman mengenali dua kategori utama, seperti pemilihan isu dan juga penonjolan aspek khusus. Penonjolan merupakan suatu proses yang memodifikasi informasi dengan tujuan membuatnya lebih bermakna, menarik, signifikan, atau mudah diingat oleh para penonton. Ketika ada penonjolan terhadap suatu realitas, hal tersebut akan memungkinkan realitas tersebut menjadi lebih terlihat dan akan memengaruhi pemahaman audiens terhadap realitas tersebut.

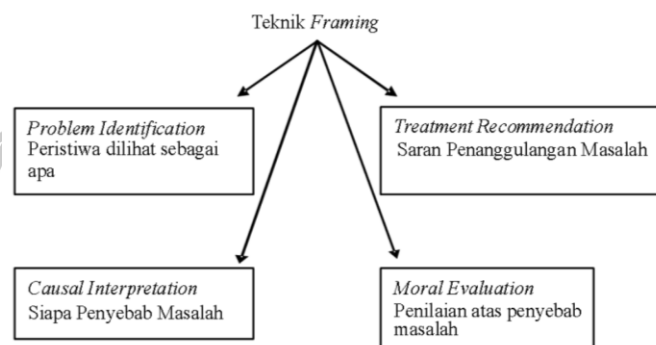
1. Seleksi Isu

Dalam konteks penyusunan kerangka berita, analisis framing yang dikembangkan oleh Robert N. Entman menjadi salah satu konsep yang memiliki arti besar. Dalam perspektifnya mengenai framing, Entman mengidentifikasi dua dimensi utama, yaitu pemilihan isu dan penonjolan elemen-elemen spesifik. Proses penonjolan ini bertujuan mengubah informasi agar lebih bermakna, menarik, signifikan, atau mudah diingat oleh audiens. Ketika elemen-elemen tertentu diberikan penonjolan dalam konteks realitas, hal tersebut akan membuat realitas tersebut lebih mencolok dan berdampak pada pemahaman audiens terhadap realitas tersebut.

2. Penonjolan Aspek

Dalam kerangka penyusunan berita, analisis framing yang diperkenalkan oleh Robert N. Entman menjadi salah satu konsep yang memiliki signifikansi. Dalam perspektifnya terkait framing, Entman mengidentifikasi dua aspek utama, yakni pemilihan isu dan penonjolan elemen-elemen tertentu. Proses penonjolan ini bertujuan untuk mengubah informasi agar lebih bermakna, menarik, penting, atau mudah diingat oleh audiens. Ketika elemen-elemen tertentu diberikan penonjolan dalam konteks realitas tertentu, hal tersebut akan membuat realitas tersebut lebih menonjol dan berdampak pada cara audiens memahami realitas tersebut.

Menurut konsep Entman, yang dimana framing pada dasarnya mencerminkan proses memberikan definisi, penjelasan, penilaian, dan saran dalam suatu wacana dengan tujuan menonjolkan suatu kerangka berpikir tertentu terkait dengan suatu peristiwa yang sedang dibahas. Terdapat empat bidang kunci dalam framing menurut Robert N. Entman, yakni merumuskan permasalahan, mendiagnosa penyebab permasalahan, melakukan penilaian moral, dan menekankan solusi atau rekomendasi. Model analisis framing yang dikembangkan oleh Robert N. Entman dalam Selasdi (2021) adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Skeman Analisis Framing Robert N. Entman
Sumber : Eriyanto, 2012

1. *Diagnose Causes* (memperkirakan penyebab masalah)

Mendiagnosa Penyebab (mengidentifikasi akar penyebab masalah) adalah tahapan yang diterapkan untuk menentukan identitas atau penyebab suatu

peristiwa. Dalam metode ini, mereka yang terlibat dalam proses framing meyakini bahwa setiap peristiwa yang serupa dapat memiliki penafsiran yang berbeda-beda, bergantung pada sudut pandang wartawan yang melaporkannya. Sehingga, penyebab yang sama dari peristiwa yang serupa dapat diartikan dengan berbagai cara. Mengenali akar penyebab suatu peristiwa ini selanjutnya membawa kita pada siapa atau apa yang dianggap sebagai pihak yang terdampak dalam situasi tersebut.

2. *Problem Identification* (pendefinisian masalah)

Identifikasi Masalah (penentuan masalah) adalah aspek pertama dalam konsep Entman adalah penekanan pada cara isu yang diangkat atau diberikan penonjolan dipandang, diinterpretasikan, dinilai, atau dilihat oleh wartawan. Penilaian ini tidak memiliki standar benar atau salah, baik atau buruk; wartawan hanya mencerminkan sudut pandang dan penilaiannya terhadap isu tersebut. Perbedaan pandangan ini terkait dengan informasi yang dimiliki oleh setiap wartawan, yang kemudian memengaruhi pola pikir mereka.

3. *Make Moral Judgement* (merancang seleksi etika)

Langkah membuat penilaian moral adalah tahap yang digunakan untuk memberikan argumen atau penjelasan terkait definisi suatu peristiwa atau isu yang sedang dibahas. Setelah masalah telah didefinisikan dan penyebabnya dipahami, diperlukan argumen atau penjelasan untuk mendukung pemahaman tersebut. Wartawan harus memilih argumen yang konsisten dengan definisi masalah dan penyebab masalah yang telah ditetapkan sebelumnya dalam pemahaman wartawan.

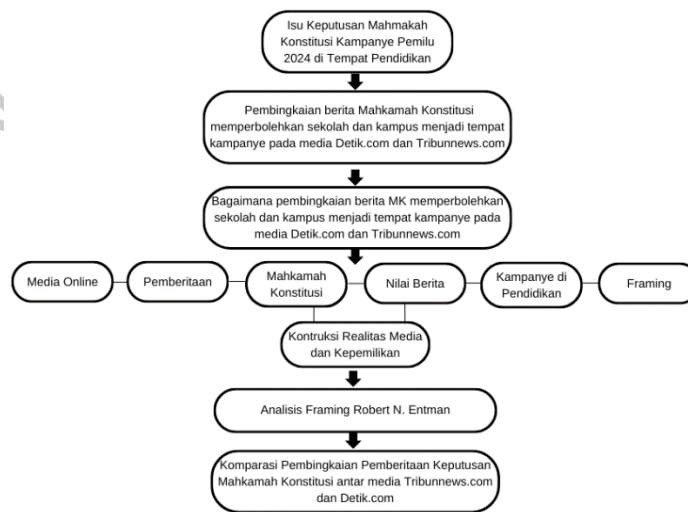
4. *Treatment Recommendation* (menekanan penyelesaian)

Rekomendasi Penyelesaian (memberikan saran penyelesaian) adalah Mengevaluasi keinginan atau tindakan yang diambil oleh wartawan dalam menyelesaikan peristiwa merupakan proses yang mengacu pada definisi masalah, siapa atau apa yang menjadi penyebab masalah, dan argumen yang digunakan untuk mendukung pemahaman tersebut.

Penelitian ini akan menggunakan kerangka kerja Entman, yang mempertimbangkan cara penentuan dan penonjolan berita dipengaruhi oleh

ideologi media dan wartawan. Selain itu, pemilihan isu melibatkan proses seleksi fakta-fakta yang relevan untuk disajikan dalam berita. Ini melibatkan identifikasi fakta penting, penekanan pada aspek-aspek tertentu dalam berita, serta analisis, definisi, dan rekomendasi dalam penyusunan berita. Skema lebih detailnya dapat ditemukan di bawah ini.

2.3 Kerangka Berpikir



Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir
Sumber : Olahan Peneliti, 2023

Penelitian ini diawali oleh isu putusan Mahkamah Konstitusi terkait putusannya mengenai kampanye pemilu diperbolehkan dilakukan di sekolah dan kampus. Kemudian media-media yang menyoroti isu tersebut dengan berbagai pemberitaan salah satunya Detik dan Tribunnews. Maka dari itu, peneliti akan mengevaluasi cara berita Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan kampanye di sekolah dan kampus diinterpretasikan dari Detik dan Tribunnews, dengan mempertimbangkan konsep-konsep seperti media online, pemberitaan, Mahkamah Konstitusi, nilai berita, kampanye di pendidikan, konstruksi realitas media, dan penerapan Entman. Analisis framing akan mencakup dimensi-dimensi seperti define problems, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment recommendation. Hasilnya nantinya akan memperoleh perbandingan pembingkaihan pemberitaan putusan Mahkamah Konstitusi antara Detik dan Tribunnews.

